

AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Isma Coryanata

E-Mail: ismacoryanata@yahoo.com

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study examined influence of accountability, public participation, and public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. The study sample was from kota Bengkulu. Thirty legislative participated in this study. Hypothesis are tasted empirically used regression. The result of study indicated that, first, budgeting knowledge are statically significant, positive coefficient indicated that high budgeting knowledge so high budgeting control. Second, all moderating variables were accountability, public participation, and public policy transparency had the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. Therefore this study sported anothehr studies before.

Keywords: *Accoutability, Public Participation, Public Policy, Transparancy, Budgeting Knowledge, Budgeting Control.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Seiring dengan PP No 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional mau-

pun di daerah. Salah satu agenda reformasi terse-but adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyeleng-garaan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan

transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggung-jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.

Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2002). Sopanah (2002) menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena belum ditemukannya variabel-variabel yang dapat berinteraksi antar pengetahuan anggaran dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan, membuat penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian Andriani (2002) dan Sopanah (2002) dengan menambahkan lagi variabel akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan pengetahuan anggaran terhadap dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi

kebijakan publik akan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999).

Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan *et.al*, 1997).

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata

Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengetahuan dan Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutamoto, 2002, Sopanah, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan keboco-

ran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Selain adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

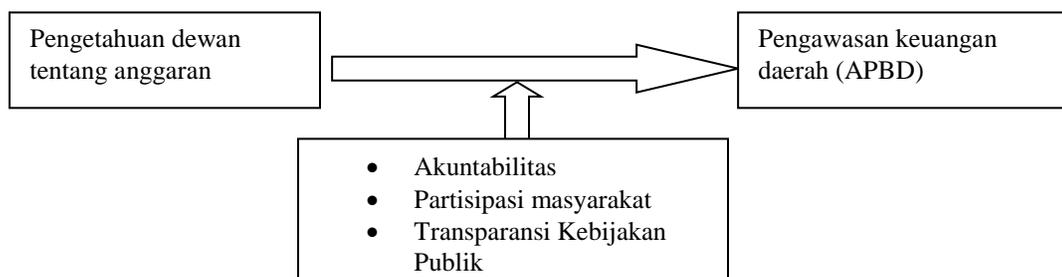
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public.

Menurut penulis asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah:

H₄: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 1):



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan DPRD di kota Bengkulu. Sampel penelitian ini adalah anggota dewan di komisi C dikarenakan di komisi ini sangat erat hubungannya dengan anggaran. Data

diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang dibuat oleh Sopinah (2002), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori yang terkait. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (kuesioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan) untuk anggota

dewan yang bertempat di kota Bengkulu. Kuesioner disebar sebanyak 30 eksemplar dikarenakan jumlah anggota dewan pada komisi anggaran di DPRD di kota Bengkulu berjumlah 30 orang.

Untuk melengkapi data tentang karakteristik responden, berikut disajikan data deskriptif dalam Tabel 1

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Responden

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin | | |
| • Pria | 27 | 90% |
| • Wanita | 3 | 10% |
| Pendidikan | | |
| • SMA | 10 | 30% |
| • S1 | 17 | 61% |
| • S2 | 1 | 3% |
| • Paket C | 2 | 6% |

Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan *validity and reliability test* atas data tersebut. Uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran (Huck dan Cormier,

1996; Hair, 1995). Setelah dilakukan *validity and reliability test*, barulah diadakan pengujian asumsi klasik.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair *et al.*, 1998). Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila *Kaiser's MSA* di atas 0,5 (Kaiser & Rice, 2974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,40 (Chia, 1995).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Instrumen dikatakan *reliable* apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0.5 (Nunally, 1967). Hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | <i>Kaiser's MSA</i> | <i>Factor Loading</i> |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PDTA | 0.666 | 0.562 | 0.594– 0.741 |
| PKD | 0.775 | 0.513 | 0.452 – 0.998 |
| PM | 0.665 | 0.531 | 0.639 – 0.996 |
| AKT | 0.774 | 0.533 | 0.639 – 0.996 |
| TKP | 0.774 | 0.513 | 0.639 – 0.996 |

Dari Table 2 terlihat bahwasanya semua variabel yang akan diuji, telah valid dan reliabel. Dengan demikian semua item

pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik. Dan sebagai variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan Anggaran

Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan

publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasn pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju, 3 (TT=Tidak Tahu, 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)

Metode Analisis

Alat analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis berganda (*multiple regression*). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 10 for windows. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Untuk menguji hipotesis 1 (H_1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

X_1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

- 2) Untuk menguji hipotesis 2 (H2)
 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$
 Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
 α = Konstanta
 X_1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran
 X_2 = Partisipasi masyarakat
 X_2 = Interaksi antara X_1 dan X_2
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

$\beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi

- 4) Untuk menguji hipotesis 4 (H4)
 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e \dots \dots \dots (4)$
 Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
 X_4 = Transparansi kebijakan public
 X_4 = Interaksi antara X_1 dan X_4
 $B_1 \beta_6 \beta_7$ = Koefisien Regresi

- 3) Untuk menguji hipotesis 3 (H3)
 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$
 Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
 X_3 = Akuntabilitas
 X_1, X_3 = nteraksi antara X_1 dan X_3

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 30 responden. Dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti tampak pada Tabel 3.

Tabel 3.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | N | Kisaran Teoritis | Kisaran Aktual | Rat-Rata | Standar Deviasi |
|----------|----|------------------|----------------|----------|-----------------|
| PKD | 30 | 12 – 60 | 2,83 – 4,67 | 3,936 | 0,428 |
| PDTA | 30 | 4 – 20 | 3,00 – 4,75 | 3,950 | 0,432 |
| PM | 30 | 7 – 35 | 2,71 – 4,71 | 3,942 | 0,538 |
| TKP | 30 | 5 – 25 | 2,80 – 4,60 | 4,013 | 0,495 |
| AKT | 30 | 5 - 25 | 2,80 – 4,60 | 4,006 | 0,507 |

Dari statistik deskriptif di atas tampaklah bahwasanya semua variabel berada pada nilai rata-rata 3 dan 4 dan ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju dari item-item pertanyaan yang peneliti ajukan.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear

yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model yang diteliti (Damodar, 1995). Multikolinearitas akan mengakibatkan koefisien regresi tidak pasti atau mengakibatkan kesalahan standarnya menjadi tidak terhingga sehingga menimbulkan bias spesifikasi.

Hair *et al.* (1995) menawarkan cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas ini, yaitu dengan melihat besarnya nilai *tolerance value (VIF)*. Apabila nilai VIF

< 10 dan nilai *tolerance* mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multi-

kolinearitas. Ringkasan hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil pengujian Multikolinearitas

| Persamaan | Collinearity Statistics | | Keterangan |
|---|-------------------------|-------|------------|
| | Tolerance | VIF | |
| 1. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$ | 1,000 | 1,000 | Bebas |
| 2. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e$ | 0,234 | 4,255 | Bebas |
| 3. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e$ | 0,177 | 8,320 | Bebas |
| 4. $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e$ | 0,105 | 2,175 | Bebas |

Dari Tabel 4 dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi multikolinearitas.

Pengujian Kenormalan Data

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnof* pada *alpha* sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorof-Smirnof* lebih besar dari 0.05 berarti data normal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan regresi berganda yang disesuaikan pada variabel moderatingnya. Dari hasil analisis korelasi ditemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), transparansi kebijakan publik (X_3), dan akuntabilitas (X_4) dengan pengawasan keuangan daerah (Y) pada tingkat signifikansi 1% ($p \leq 0,01$) dengan koefisien korelasi 0,850; 0,933; 0,916; dan 0,913. Hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif antara pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas,

partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik dengan pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis (1)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi untuk model (1) tersaji dalam Tabel 5. Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran (R^2) sebesar 72,30% dengan nilai $F = 72,975$ dan signifikan pada $p = 0,000$.

Menurut hasil analisis pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.608 dengan tingkat signifikan pada $p = 0,000$ yang artinya adanya pengaruh yang kuat antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis (1) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dapat diterima.

Pengujian Hipotesis (2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi untuk model (2) tersaji dalam Tabel 6. Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh akuntabilitas (R^2) sebesar 87,40% dengan nilai $F = 60,166$ dan signifikan pada $p = 0,000$.

Menurut hasil analisis hubungan antara akuntabilitas dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.149 dengan tingkat signifikan pada $p = 0,000$ yang artinya akuntabilitas mempunyai pengaruh pemoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis (3) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat diterima.

Pengujian Hipotesis (3)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi untuk model (3) tersaji pada Tabel 7. Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (R^2) sebesar 87,70% dengan nilai $F = 61,725$ dan signifikan pada $p = 0,000$.

Menurut hasil analisis, hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.072 dengan tingkat signifikan pada $p = 0,000$ yang artinya partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis (2) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak dapat ditolak.

Tabel 5.
Hasil pengujian Hipotesis 1

| Simbol | Variabel | Koefisien Beta | Nilai Koefisien | Standar Error | T - value | p |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------|
| X ₁ | PDTA | β_1 | 0,843 | 0,099 | 8,543 | 0,000 |
| | Konstansta | α | 0,608 | 0,392 | 1,552 | 0,000 |
| R ² = 72,30 % | | F = 72,975 | p = 0,000 | n= 30 | TS = Tidak Signifikan | |

Tabel 6.
Hasil pengujian Hipotesis 2

| Simbol | Variabel | Koefisien Beta | Nilai Koefisien | Standar Error | T - value | p |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|
| X ₁ | PDTA | β_1 | -0,293 | 0,584 | -0,295 | 0,000 |
| X ₃ | AKT | β_4 | 0,026 | 0,500 | 0,053 | 0,000 |
| X ₁ X ₃ | Pemoderasi | β_5 | 0,149 | 0,139 | 1,071 | 0,005 |
| | Konstansta | α | 2,598 | 2,010 | 1,292 | 0,000 |
| R ² = 87,40% | F = 60,166 | p = 0 00 | n= 30 | TS = Tidak Signifikan | | |

Tabel 7.
Hasil pengujian Hipotesis 3

| Simbol | Variabel | Koefisien Beta | Nilai Koefisien | Standar Error | T - value | p |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|
| X ₁ | PDTA | β_1 | -0,157 | 0,580 | -0,270 | 0,000 |
| X ₂ | PM | β_2 | 0,389 | 0,489 | 0,794 | 0,000 |
| X ₁ X ₂ | Pemoderasi | β_3 | 0,072 | 0,136 | 0,532 | 0,004 |
| | Konstansta | α | 1,876 | 1,968 | 0,953 | 0,005 |
| R ² = 87,70 % | F = 61,725 | p = 0,000 | n= 30 | TS = Tidak Signifikan | | |

Tabel 8.
Hasil pengujian Hipotesis 4

| Simbol | Variabel | Koefisien Beta | Nilai Koefisien | Standar Error | T - value | p |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|
| X ₁ | PDTA | β_1 | -0,233 | 0,576 | -0,405 | 0,000 |
| X ₄ | TKP | β_6 | 0,101 | 0,497 | 0,203 | 0,000 |
| X ₁ X ₄ | Pemoderasi | β_7 | 0,134 | 0,1381 | 0,970 | 0,000 |
| | Konstansta | α | 2,312 | 1,993 | 1,160 | 0,000 |
| R ² = 87,80 | F = 62,54 | p = 0,000 | n= 30 | TS = Tidak Signifikan | | |

Pengujian Hipotesis (4)

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi untuk model (4) tersaji pada Tabel 8. Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh transparansi kebijakan publik (R²) sebesar 87,80% dengan nilai F = 62,54 dan signifikan pada p = 0,000.

Menurut hasil analisis hubungan antara tranparansi kebijakan publik dengan

pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.134 dengan tingkat signifikan pada p = 0,000 yang artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis (4) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat diterima.

PENUTUP

Dari hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya.

Selain pengujian dilakukan dengan regresi sederhana, peneliti juga menggunakan regresi berganda untuk melihat bagaimana pengetahuan dewan terhadap anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variable yang peneliti turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel pemoderasi, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. Semua hipotesis yang peneliti ajukan, semuanya diterima dengan tingkat signifikan 0,000.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua anggota dewan bahwasanya betapa pentingnya pengetahuan tentang anggaran dalam rangka pengawasan keuangan daerah. Sehingga pada saat penyusunan/penyetujuan suatu anggaran khususnya keuangan daerah nantinya, benar-benar bisa lebih akurat, akuntabel serta transparansi pada publik. Hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan masukan pada literatur-literatur maupun penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah dan akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., M. Mahmuddin., S. Rusmiyatri., dan Sonny. 2002. *Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, R. 2002. *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs Terhadap Peranan DPRD Se-Propinsi Bengkulu*, Interest, Bengkulu.
- Alamsyah. 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis, Yogyakarta.
- Ichsan, M. R. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*, Malang: Brawijaya Universty Pers.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Bandung: Citra Umbara.

- _____. 2001. *Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Bandung : Citra Umbara. *Jurnal Public Budgetting & Finance*, Summer.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban anggaran*, Bandung: Citra Umbara. Sjamsudin, S. 2001. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten, *Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial*, Malang.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang No.108 tahun 1999 Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, Bandung: Citra Umbara. Sopanah. 2002. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Makalah Symposium Nasional Akuntansi V, Semarang
- Rubin, I. 1996. *Budgetting for Accountability: Municipal Budgetting for the 1990s*,

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Mohon Bapak/Ibu menjawab dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan dari SS (5) hingga STS (1) terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

| No | Pernyataan | SS | S | TT | TS | STS |
|----|---|----|---|----|----|-----|
| 1 | Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami | | | | | |
| 3 | Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahui | | | | | |
| 4 | Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek | | | | | |

Partisipasi Masyarakat

| No | Pernyataan | SS | S | TT | TS | STS |
|----|--|----|---|----|----|-----|
| 1 | Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD | | | | | |
| 2 | Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan proioritas APBD | | | | | |
| 3 | Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD | | | | | |
| 4 | Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran | | | | | |
| 5 | Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD | | | | | |
| 6 | Saran dan kritik darimasyarakat saya kira dapat dijadikan pertimbangan untuk merivisi anggaran | | | | | |
| 7 | Jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat | | | | | |

Transparansi Kebijakan Publik

| No | Pernyataan | SS | S | TT | TS | STS |
|----|--|----|---|----|----|-----|
| 1 | Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi | | | | | |
| 2 | Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran | | | | | |
| 3 | Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini sudah tepat waktu | | | | | |
| 4 | Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat | | | | | |
| 5 | Adanya system pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran | | | | | |

Pengawasan Keuangan Daerah

| No | Pernyataan | SS | S | TT | TS | STS |
|----|---|----|---|----|----|-----|
| 1 | Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD | | | | | |
| 2 | Analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun APBD | | | | | |
| 3 | Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD | | | | | |
| 4 | Saya terlibat dalam pengesahan APBD | | | | | |
| 5 | Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan | | | | | |
| 6 | Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi | | | | | |
| 7 | Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD | | | | | |
| 8 | Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif | | | | | |
| 9 | Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran | | | | | |
| 10 | Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota | | | | | |
| 11 | Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan | | | | | |
| 12 | Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD saya kira hanya karena ketidakcermatan dalam menghitung nota anggaran | | | | | |

Akuntabilitas

| No | Pernyataan | SS | S | TT | TS | STS |
|----|--|----|---|----|----|-----|
| 1 | Saya merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyarakat | | | | | |
| 2 | Menurut saya masyarakat mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah diamanahkan kepada anggota dewan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Saya perlu meminta pertanggungjawaban jika terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran dari Bupati/Walikota | | | | | |
| 4 | Saya merasa DPRD sekarang telah akuntable | | | | | |
| 5 | Menurut saya akuntabilitas sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja dari suatu lembaga terutama DPRD | | | | | |

Data demografi (mohon diberi tanda silang (x) dan juga isilah sesuai dengan data pribadi Bapak/Ibu:

1. Umur.....tahun
2. Jenis kelamin: pria wal^{ta}
3. Pendidikan Terakhir: S1 S2 S3
4. Jabatan di organisasi.....
5. Lamanya di jabatan sekarang..... tahun
6. Lamanya bekerja di organisasi ini.....tahun